

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi sektor publik termasuk bidang akuntansi yang masih baru di Indonesia, namun dalam waktu relatif singkat telah mengalami perkembangan secara pesat. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi bagi pemerintah dan publik. Saat ini, terdapat perhatian besar bagi praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, baik lembaga sektor pemerintahan maupun lembaga publik non-pemerintahan. Namun, dalam realisasinya menurut Mardiasmo, (2018) organisasi sektor publik dianggap sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Hal tersebut disebabkan masih kurangnya kompetensi pegawai organisasi sektor publik dalam pengelolaan anggaran. Keadaan ini mengisyaratkan untuk dilakukan pengukuran kinerja terhadap hasil kerja pada organisasi sektor publik.

Pemerintah Desa termasuk dalam contoh organisasi sektor publik. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa menjadi organisasi sektor publik yang paling dekat dengan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan pelayanan di desa dapat diwujudkan dengan pemberian pelayanan cepat, tepat dan mudah serta biaya yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Masyarakat desa sudah semakin kritis yang dibuktikan dengan adanya tuntutan diadakannya transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah desa.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu, pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai

sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa diharapkan dapat menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, dalam penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan asas efektivitas dan efisiensi. Dari hal tersebut diharapkan pemerintah desa selalu meningkatkan kinerjanya dalam segi ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Aspek yang perlu dijadikan perhatian untuk meningkatkan kinerja dalam rangka membentuk penataan desa yang diharapkan, antara lain: mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah desa, dan meningkatkan daya saing desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam pengelolaan keuangan desa memerlukan asas keadilan, kepatuhan dan kebermanfaatan untuk masyarakat desa. Kemampuan desa dalam mengelola keuangan desa dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang ideal dan realisasinya dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (LRAPBDes). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa memuat cerminan kemampuan Pemerintah Desa dalam membiayai pelaksanaan program atau kegiatan desa, pembangunan desa dan pelayanan kepada masyarakat desa.

Kinerja merupakan hasil kerja yang telah tercapai dari pelaksanaan suatu kegiatan atau program dengan tujuan untuk mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja sektor publik bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui tolok ukur kinerja

yang telah ditetapkan. Pengelolaan anggaran yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan kesejahteraan masyarakat, mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai pada tahap pelaksanaan anggaran diukur dengan menggunakan konsep *value for money*. *Value for money* merupakan prinsip pengelolaan anggaran sektor publik yang mendasar pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2018).

Kinerja pemerintah desa dapat diukur menggunakan konsep *value for money*. Menurut (Mardiasmo, 2018) *value for money* merupakan inti dari pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu: ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Pemerintah Desa Tulungrejo merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Wates Kabupaten Blitar. Dari hasil survei lapangan dapat diamati bahwa Pemerintah Desa Tulungrejo memiliki transparansi dalam hal informasi keuangan, dibuktikan dengan mudahnya akses data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Namun, dalam praktiknya terdapat beberapa tahun untuk pendapatan asli desa tidak sesuai dengan anggaran pendapatan yang telah dibuat.

Hal tersebut terjadi dikarenakan kemampuan sumber daya manusia atau aparat penagih pendapatan masih perlu ditingkatkan, serta kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan kewajibannya. Selain itu, Pemerintah Desa Tulungrejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar belum pernah melakukan pengukuran kinerja menggunakan konsep *value for money*, maka dari itu untuk mengetahui program dan kegiatan yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan organisasi, diperlukan pengukuran dalam kinerja. Pengukuran kinerja ini penting untuk mengukur dan menganalisis kinerja Pemerintah Desa Tulungrejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar dari tingkat

ekonomi, tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas dalam merealisasikan program-program yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian tersebut, dengan memahami fenomena kinerja organisasi pemerintah khususnya pemerintah desa yang kian menjadi sorotan publik dan belum dilakukannya pengukuran kinerja menggunakan konsep *value for money*, maka penelitian ini mengukur dan menganalisis kinerja Pemerintah Desa Tulungrejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar periode anggaran tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 menggunakan konsep *value for money* karena pada tahun 2016-2020 mengalami penurunan realisasi anggaran pendapatan dari anggaran pendapatan yang telah ditetapkan, tahun 2021 mengalami peningkatan realisasi anggaran pendapatan terhadap anggaran pendapatan, sedangkan realisasi anggaran belanja pada tahun 2016-2021 mengalami penurunan terhadap anggaran belanja yang telah dibuat. Dengan adanya latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini diberi judul “PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DESA BERDASARKAN KONSEP *VALUE FOR MONEY* (Studi pada Desa Tulungrejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja Pemerintah Desa Tulungrejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar berdasarkan tingkat ekonomi?
2. Bagaimana kinerja Pemerintah Desa Tulungrejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar berdasarkan tingkat efisiensi?
3. Bagaimana kinerja Pemerintah Desa Tulungrejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar berdasarkan tingkat efektivitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur dan menganalisis kinerja Pemerintah Desa Tulungrejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar berdasarkan tingkat ekonomi.

2. Untuk mengukur dan menganalisis kinerja Pemerintah Desa Tulungrejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar berdasarkan tingkat efisiensi.
3. Untuk mengukur dan menganalisis kinerja Pemerintah Desa Tulungrejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar berdasarkan tingkat efektivitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan hasil pengukuran kinerja ditinjau dari segi ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Dengan demikian, dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Pemerintah Desa Tulungrejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar khususnya untuk meningkatkan kinerja menjadi lebih baik dan mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat.

2. Manfaat Bagi Peneliti

Mengetahui fakta yang ada di lapangan terkait hasil pengukuran kinerja di lingkup pemerintah Desa didasarkan pada konsep *value for money* khususnya di Pemerintah Desa Tulungrejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar.

3. Manfaat Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini, dapat menambah wawasan dan membantu peneliti selanjutnya dalam mencari referensi terkait pengukuran kinerja organisasi sektor publik khususnya pada Pemerintah Desa berdasarkan konsep *value for money*.